

KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI DI DESA JAYAPURA KECAMATAN CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA

Chandra Waluya¹⁾, Bunga Aprillia²⁾, Waluyo Zulfikar³⁾

1,2,3) Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi di Desa Jayapura, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, wilayah yang rawan gempa dan telah terdampak signifikan pada tahun 2009 dan 2024. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari kepala desa, tim siaga bencana desa, ketua karang taruna, dan masyarakat. Hasil penelitian mengacu pada indikator kapasitas masyarakat dari RBI BNPB, yang terdiri dari parameter spesifik (pengetahuan kesiapsiagaan dan pengelolaan tanggap darurat) serta parameter generik (kerentanan, ketergantungan terhadap pemerintah, dan partisipasi masyarakat). Penelitian menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya pengetahuan tentang kesiapsiagaan, rendahnya kemampuan pengelolaan darurat, ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Maka dari itu peneliti memberikan Kesimpulan bahwa peningkatan kapasitas melalui edukasi, pelatihan kebencanaan, dan keterlibatan aktif semua elemen masyarakat sangat diperlukan guna mengurangi risiko dan dampak bencana gempa bumi.

Kata kunci: kapasitas masyarakat, gempa bumi, kesiapsiagaan, partisipasi, mitigasi bencana.

Abstract

This study aims to describe the community capacity in facing earthquake disasters in Jayapura Village, Cigalontang District, Tasikmalaya Regency, an earthquake-prone area that has been significantly impacted in 2009 and 2024. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants consisted of the village head, the village disaster preparedness team, the head of the youth organization, and the community. The results of the study refer to the community capacity indicators from the BNPB RBI, which consist of specific parameters (knowledge of preparedness and emergency response management) and generic parameters (vulnerability, dependence on the government, and community participation). The study shows that community capacity is still relatively low. This is evident from the lack of knowledge about preparedness, low emergency management capabilities, high dependence on government assistance, and suboptimal community participation. Therefore, the researcher provides the conclusion that increasing capacity through education, disaster training, and the active involvement of all

elements of society is very necessary to reduce the risk and impact of earthquake disasters.

Keywords: *community capacity, earthquake, preparedness, participation, disaster mitigation.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, terutama gempa bumi, karena letaknya berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia (Beno, 2022). Salah satu wilayah yang terdampak adalah Desa Jayapura, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, yang mengalami kerusakan signifikan akibat gempa bumi pada tahun 2009 dan 2024. Kerusakan tersebut meliputi ratusan rumah dan infrastruktur, serta mengakibatkan korban luka dan dampak sosial yang luas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana.

Hidup di daerah rawan bencana menuntut setiap individu untuk siap menghadapi bencana yang tidak terduga, karena bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Kesiapan menghadapi bencana dan pengambilan keputusan yang matang untuk mencegahnya adalah apa yang kita sebut dengan kesiapsiagaan bencana. Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan masalah bersama, baik individu maupun lembaga. Perencanaan yang baik sangat penting karena bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang diperlukan agar dapat menghadapi situasi bencana secara efektif. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mempelajari kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Kapasitas masyarakat yang meliputi pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan merupakan kunci ketahanan dan meminimalkan dampak bencana.

Bencana, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam. Dalam konteks ini, kapasitas masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan lokal. Kapasitas masyarakat mencakup pengetahuan, keterampilan, sumber daya, serta partisipasi dalam merespons

dan memitigasi bencana (Aprillia, 2025). Namun, hasil observasi awal menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta minimnya pelatihan kebencanaan.

Tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana meliputi tindakan pencegahan dan mitigasi. Pencegahan meliputi tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana atau mencegah dampak yang merugikan bagi masyarakat dan fasilitas, sedangkan mitigasi meliputi tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bahaya dan meminimalkan risiko bencana yang akan datang. Tindakan mitigasi sering disebut sebagai tindakan struktural dan non-struktural, sedangkan tindakan kesiapsiagaan dilakukan untuk mengantisipasi bencana guna memastikan efektivitas dan ketepatan tindakan selama dan setelah bencana. Tindakan yang dilakukan setelah bencana meliputi tindakan tanggap darurat yang dilakukan segera setelah bencana untuk membantu para korban dan memenuhi kebutuhan dasar mereka yang selamat dari kejadian bencana. Contoh tindakan yang dilakukan saat tanggap darurat meliputi operasi pencarian dan penyelamatan bagi korban bencana, memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak, mengoordinasikan pusat evakuasi untuk memastikan hak-hak bertahan hidup para penyintas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, tindakan pemulihan, atau rehabilitasi, yang pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi layanan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana, dan terakhir, yaitu upaya rekonstruksi.

Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang beberapa kali dilanda bencana dalam beberapa kurun waktu terakhir, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia yang mengakibatkan hilangnya atau punahnya mata pencaharian dan kehidupan masyarakat yang terdampak akibat bencana alam seperti hilangnya harta benda seperti rumah dan kendaraan, atau kehilangan orang yang dicintai akibat bencana yang menelan korban jiwa. Potensi bencana yang sering terjadi di Tasikmalaya dan sekitarnya antara lain gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan banjir. Kemungkinan kerentanan di Tasikmalaya muncul dari terjadinya

gempa bumi, yang merupakan ancaman yang sering terjadi dan merugikan bagi penduduk daerah tersebut. Karena letaknya di pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Eurasia dan lempeng samudra Indo-Australia di selatan Tasikmalaya, di mana lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah Lempeng Eurasia sehingga membentuk zona subduksi yang rentan terhadap gempa bumi.

Permasalahan yang diidentifikasi antara lain adalah rendahnya pengetahuan kesiapsiagaan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung tanggap darurat, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana juga masih rendah, yang berdampak pada lemahnya sistem perlindungan komunitas terhadap ancaman gempa bumi (Arinza, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kapasitas masyarakat Desa Jayapura dalam menghadapi bencana gempa bumi. Fokus penelitian diarahkan pada aspek pengetahuan kesiapsiagaan, pengelolaan tanggap darurat, kerentanan sosial ekonomi, ketergantungan terhadap pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan strategi peningkatan kapasitas berbasis komunitas di wilayah rawan bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi di Desa Jayapura, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Objek penelitian adalah masyarakat Desa Jayapura, sedangkan subjek penelitian terdiri dari Kepala Desa, Tim Siaga Bencana Desa, Ketua Karang Taruna, dan warga perwakilan dari masing-masing RW. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu agar dapat memberikan informasi yang relevan (Sugiyono, 2020).

Alat yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pedoman wawancara, alat dokumentasi (kamera dan alat tulis), serta perekam suara

untuk keperluan transkrip data. Penelitian tidak menggunakan desain eksperimen, melainkan mengandalkan pengamatan situasi sosial secara langsung dan wawancara mendalam terhadap informan kunci.

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini tidak bersifat kuantitatif, namun terdiri dari lima parameter kapasitas masyarakat sesuai indikator dari RBI BNPB, yakni dua parameter spesifik (pengetahuan kesiapsiagaan dan pengelolaan tanggap darurat) dan tiga parameter generik (kerentanan masyarakat, ketergantungan terhadap dukungan pemerintah, serta partisipasi masyarakat) (Aprillia, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk meningkatkan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode (Subagyo, 2023). Seluruh data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Meskipun tidak menggunakan model statistik, validitas data diuji dengan uji kredibilitas, dependabilitas, dan transferabilitas sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif (Subagyo, 2023).

Pembahasan

Desa Jayapura sebagai lokasi penelitian berada dalam kawasan yang secara geografis dan geologis rawan mengalami bencana, terutama gempa bumi. Dalam konteks pengurangan risiko bencana, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai aktor utama yang berperan penting dalam membangun ketahanan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat merupakan strategi utama dalam upaya mitigasi bencana yang berkelanjutan.

Kapasitas masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan individu maupun kolektif dalam mengenali, merespons, dan pulih dari dampak bencana. Hal ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sumber daya, kelembagaan lokal, dan jejaring sosial yang

dimiliki masyarakat setempat. Dengan mengkaji kapasitas masyarakat di tingkat desa, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana kesiapan masyarakat dalam menghadapi risiko gempa bumi, sekaligus sebagai dasar bagi perumusan kebijakan berbasis kebutuhan lokal.

Dalam upaya mengurangi risiko bencana di wilayah rawan gempa bumi, kapasitas masyarakat menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima dampak, tetapi juga sebagai subjek utama dalam kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Desa Jayapura, yang terletak di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan salah satu wilayah dengan potensi gempa bumi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas masyarakat Desa Jayapura dalam menghadapi bencana gempa bumi, berdasarkan parameter spesifik dan generik yang ditetapkan oleh RBI BNPB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat masih tergolong rendah. Berikut adalah pembahasan yang dibagi berdasarkan lima parameter utama.

1. Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana

Sebagian besar masyarakat belum memahami langkah-langkah dasar dalam menghadapi gempa bumi, seperti cara menyelamatkan diri atau mengenali jalur evakuasi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan kebingungan masyarakat saat terjadi gempa tahun 2024. Minimnya sosialisasi dan pelatihan menjadi penyebab utama rendahnya pengetahuan.

Kondisi ini menguatkan asumsi bahwa peningkatan literasi kebencanaan sangat penting untuk membentuk masyarakat yang tanggap bencana.

2. Pengelolaan Tanggap Darurat

Secara umum, masyarakat tidak mengetahui prosedur darurat seperti lokasi pengungsian, sistem distribusi bantuan, maupun penanganan korban luka ringan. Hal ini diperparah oleh keterbatasan sarana prasarana seperti peralatan pertolongan pertama dan fasilitas evakuasi. Meskipun pemerintah desa telah membentuk Tim Siaga Bencana, namun perannya masih belum maksimal di tingkat masyarakat. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kesiapan logistik dan koordinasi lapangan.

3. Pengaruh kerentanan Masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana

Kerentanan masyarakat juga tinggi, terutama karena faktor ekonomi dan pendidikan. Banyak rumah warga yang tidak tahan gempa dan dibangun tanpa standar konstruksi yang aman. Pendapatan warga rata-rata tergolong rendah dan akses terhadap informasi bencana masih terbatas. Hal ini memperbesar risiko kerusakan dan korban saat bencana terjadi.

Tabel 1. Indikator Kerentanan Sosial dan Ekonomi

Indikator	Temuan Lapangan
Kualitas Rumah Tinggal	Sebagian besar rumah tidak tahan gempa
Tingkat Pendidikan	Mayoritas lulusan SD
Penghasilan Harian	Rata-rata di bawah UMR

Peneliti juga mengamati interaksi masyarakat yang cukup terbuka dan aktif dalam forum diskusi saat sosialisasi berlangsung. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif bertanya dan menyampaikan pandangan, termasuk kekhawatiran mereka mengenai anggaran, bantuan pasca bencana, dan kesiapan desa dalam menghadapi gempa. Secara umum, observasi menunjukkan bahwa Desa Jayapura memiliki potensi dan semangat komunitas yang cukup tinggi dalam upaya

pengurangan risiko bencana. Namun, masih diperlukan penguatan dari sisi infrastruktur, penandaan evakuasi, serta dukungan anggaran untuk menjaga keberlanjutan program kesiapsiagaan bencana yang sudah berjalan.

4. Ketergantungan terhadap dukung Pemerintah

Warga cenderung menunggu bantuan pemerintah dalam setiap fase bencana, baik pra, saat, maupun pasca bencana. Hal ini menunjukkan rendahnya kemandirian dalam menghadapi bencana. Masyarakat belum memiliki inisiatif mandiri seperti membentuk kelompok relawan atau menyiapkan logistik darurat secara swadaya.

Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat umum, dukungan pemerintah dalam upaya pengurangan kerentanan terhadap gempa bumi dinilai sudah ada, tetapi belum merata. Warga mengaku pernah menerima sosialisasi dari BPBD maupun tim siaga desa, dan bahkan sempat mengikuti simulasi gempa. Namun kegiatan tersebut belum dilakukan secara rutin, dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, bantuan fisik seperti dukungan logistik atau perbaikan bangunan tahan gempa belum dirasakan langsung oleh sebagian masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah yang kurang terjangkau.

5. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi dalam kegiatan pengurangan risiko bencana sangat minim. Masyarakat jarang terlibat dalam forum-forum desa terkait kebencanaan, termasuk saat dilakukan simulasi atau pelatihan oleh BPBD atau organisasi relawan. Ini menandakan bahwa meskipun ada kebijakan, implementasi di tingkat akar rumput belum berjalan optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung hipotesis awal bahwa kapasitas masyarakat Desa Jayapura masih rendah. Faktor yang paling dominan adalah lemahnya edukasi kebencanaan dan belum adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga terkait. Penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya di Palu Barat dan Jayapura Papua, di

mana peningkatan kapasitas masyarakat menjadi tantangan utama dalam manajemen bencana berbasis komunitas.

Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi peneliti di lapangan, di mana terlihat bahwa sebagian masyarakat tampak terlibat aktif dalam kegiatan kebencanaan, seperti gotong royong membersihkan jalur evakuasi dan mengikuti simulasi gempa yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan relawan. Namun, masih ditemukan pula beberapa wilayah RT yang belum memiliki papan informasi evakuasi, peta jalur aman, atau sarana pendukung lainnya. Observasi juga menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi cenderung dilaksanakan di titik-titik tertentu yang mudah dijangkau, sehingga warga yang tinggal di daerah terpencil atau perbukitan relatif kurang mendapatkan akses informasi dan pelatihan secara langsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana di Desa Jayapura telah berjalan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan, penyebaran informasi, dan keterbatasan sarana prasarana. Hal ini menekankan pentingnya penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas masyarakat secara menyeluruh, serta pemerataan akses terhadap kegiatan pelatihan kebencanaan agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesiapsiagaan yang merata dalam menghadapi ancaman gempa bumi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas masyarakat Desa Jayapura dalam menghadapi bencana gempa bumi masih berada pada tingkat rendah. Hal ini tercermin dari lima aspek utama.

1. Pengetahuan Kesiapsiagaan Masyarakat

Dari sisi pengetahuan kesiapsiagaan, masyarakat Desa Jayapura menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup baik. Hal ini tercermin dari keterlibatan warga dalam berbagai pelatihan dan simulasi bencana yang diselenggarakan oleh BPBD maupun relawan desa. Masyarakat mulai memahami pentingnya mengetahui jalur evakuasi, cara bertindak saat terjadi gempa, serta langkah awal penanganan darurat.

2. Pengelolaan Tanggap Darurat

Dalam aspek pengelolaan tanggap darurat, masyarakat memiliki inisiatif yang cukup baik dalam menyampaikan keluhan atau saran pasca kegiatan sosialisasi maupun ketika terjadi potensi bencana. Informasi biasanya disampaikan melalui forum musyawarah desa atau obrolan informal, kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Siaga Bencana dan pemerintah desa. Meski demikian, proses tindak lanjut terhadap masukan masyarakat kerap terhambat oleh keterbatasan anggaran dan mekanisme birokrasi, sehingga penanganan sering kali tidak bisa dilakukan secara cepat.

3. Kerentanan Masyarakat terhadap Resiko Bencana

Kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana juga menjadi faktor yang memengaruhi kapasitas mereka. Beberapa warga, terutama yang tinggal di daerah perbukitan atau pemukiman padat, memiliki keterbatasan akses terhadap informasi maupun fasilitas pendukung seperti jalur evakuasi dan papan informasi. Selain itu, perbedaan tingkat partisipasi antarwarga menunjukkan adanya ketimpangan dalam kesiapsiagaan, di mana warga yang aktif secara sosial lebih siap dibanding mereka yang kurang terlibat dalam kegiatan desa.

4. Ketergantungan terhadap Dukungan Masyarakat

Dalam hal ketergantungan terhadap dukungan pemerintah, masyarakat masih sangat bergantung pada inisiatif dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa maupun BPBD. Meskipun terdapat usaha swadaya dan inisiatif lokal, sebagian besar program kesiapsiagaan masih bersifat top-down. Hal ini menandakan bahwa kapasitas mandiri masyarakat perlu diperkuat, agar mereka tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam membangun ketangguhan desa terhadap bencana.

5. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Adapun bentuk partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam simulasi, penyuluhan, gotong royong, serta penyampaian masukan terhadap pelaksanaan program kebencanaan. Partisipasi ini menunjukkan adanya kemauan kolektif dari warga untuk berkontribusi, meskipun masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi secara merata. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa masih ada wilayah RT yang belum terfasilitasi dengan baik dalam hal informasi kebencanaan, sehingga dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, kapasitas masyarakat Desa Jayapura dalam menghadapi gempa bumi telah terbentuk melalui keterlibatan aktif dalam pelatihan dan koordinasi kebencanaan. Namun, kapasitas tersebut masih perlu diperkuat melalui pemerataan informasi, peningkatan akses terhadap fasilitas evakuasi, serta penguatan peran masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengurangan risiko bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, 2025. (2025). *Memahami Manajemen Bencana di Indonesia* (1st ed.).
Arinza, R. S. (2022). *Kajian Kapasitas Masyarakat Desa Wisata Pulau Bungin*

Berbasis Marine Aquaculture.

Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Kesipasiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Rob Di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2021. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.

Penelitian, M., Agus, K., Ip, S., Si, M., Ip, S., Kom, S., & Ap, M. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si, Dr. Indra Kristian, S.IP., S.Kom., M.AP., CIQaR (Issue July).

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*